

REDEFINISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TERANG PENDIDIKAN KARAKTER

Amri Darwis

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. H.R Subrantas Km 17 Panam Pekanbaru Riau

Email: amridarwis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini berupaya mendefinisikan ulang konsep pendidikan agama Islam (PAI) terutama dalam bidang pendidikan akhlak yang dihadapkan dengan konteks kekinian yaitu persoalan lemahnya karakter bangsa. Pertimbangan kajian disebabkan 3 hal, yaitu; 1) materi akhlak sedang menjadi sorotan publik, 2) materi akhlak merupakan inti ajaran Islam dan 3) ada penyempitan makna akhlak dalam PAI. Metode pembahasan yang digunakan adalah filsafat pendidikan Islam. Data diolah berdasarkan analisis terhadap teks, kemudian didialogkan dengan konteks kebutuhan umat saat ini, serta disintesis dengan nilai-nilai aktual-universal ajaran Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PAI itu: 1) intinya membentuk akhlak, bukan mengajarkan ritual semata; 2) materi akhlak belum menyentuh isu-isu kontemporer termasuk isu bagaimana umat Islam Indonesia berbangsa dan bernegara secara lebih baik; 3) ada relasi makna antara akhlak, moral dan karakter dalam konteks PAI. Pembelajaran PAI yang berbasis akhlak, moral dan karakter hendaknya mempertimbangkan prinsip: 1) integrasi, 2) relativitas, 3) lingkungan, 4) timbal balik dan 5) relevansi atau adaptasi. Kelima prinsip tersebut pada dasarnya menghindari praktik PAI yang simbolis, formalis, apologetis dan fanatis.

Kata Kunci: Akhlak, Moral, Karakter, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

This paper attempts to redefine the concept of Islamic Religious Education (PAI), especially in the field of moral education, which is confronted with the problem in the present context: weak character of the nation. The study is based on these three things: 1) the material of akhlaq is being the public concern, 2) it is also the core of Islamic teachings, and 3) The term 'akhlaq' experiences limitation in terms of meaning in PAI. The method of discussion used is the philosophical of Islamic education. The data is processed through the discourse analysis, then discussed in accordance with the context and the present needs, and synthesized with actual and universal values of Islamic teachings. The results showed that 1) the core of PAI is building character, not merely teaching rituals, 2) The materials about 'akhlaq' do not cover the contemporary issues such as how Muslims in Indonesia live better as the member of the state and the nation, 3) there is a meaningful relation between ethics, morals and characters in the context of PAI. PAI which is based on akhlaq, moral principles and character should consider: 1) integration, 2) relativity, 3) environment, 4) reciprocity, and 5) the relevance or adaptation. The five principles are essentially avoiding the symbolic PAI practices which is formalist, apologetics and fanatical.

Keywords: Akhlak, Moral, Character, Islamic Religious Education

PENDAHULUAN

Sekitar 200 warga anti-Syiah menyerbu permukiman milik komunitas Syiah di Dusun Nangkernang Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Jawa Timur, Minggu pagi 26 Agustus 2012. Mereka melempari rumah penganut Syiah dengan batu. Aksi tersebut dibalas pemuda Syiah sehingga bentrokan pun tak terhindarkan. Seorang penganut Syiah tewas akibat sabetan clurit. Sekitar sepuluh rumah terbakar dan ratusan warga mengungsi. Pemerintah kemudian memberi keterangan bahwa pemicu aksi anarkisme ini adalah masalah internal keluarga yang kemudian meluas pada perbedaan aliran keagamaan (Pikiran Rakyat, 30-8-2012).

Kekerasan yang mengatasnamakan agama berkontradiksi dengan kehidupan simbolis keberagaman bangsa Indonesia saat ini. Praktik dan ritus keberagaman Islam di Indonesia semakin marak. Pengajian dan majlis ta'lim hampir di setiap masjid terjadwalkan dengan rutin. Lantunan ayat suci bertaburan pada setiap acara peringatan hari-hari besar Islam. Gema adzan maghrib berkumandang di semua stasiun televisi. Penampilan pakaian para pejabat bak ustadz dan kiai alim. Akan tetapi, semua bertolak belakang dengan kenyataan kehidupan keseharian warga dan negara Indonesia. Tindak kekerasan suatu kelompok agama atas kelompok lainnya seolah diperbolehkan terjadi. Korupsi para pejabat semakin merajalela. Pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan menjadi pemandangan yang lazim. Kemiskinan dianggap hanya merupakan persoalan individual yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban secara keumatan untuk mengunggulangnya. Ketidakadilan bagi kaum papa semakin nampak mengkhawatirkan dan menggoncangkan sendi-sendi penegakan hukum. Suprayogo mengatakan bahwa ini merupakan indikasi gagalnya sistem pendidikan di Indonesia terutama sistem pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, masyarakat seharusnya tidak hanya diajari ritus tetapi juga dilatih menerapkan perdamaian, menerima perbedaan agama dan aliran agama, jujur, adil dan peduli terhadap sesama. Agama Islam hadir untuk membawa kedamaian bukan kekacauan, kekerasan dan ketidakadilan (Suprayogo, 2012 dalam *Pikiran Rakyat* edisi 30-8-2012).

Belakangan ini banyak orang menganggap bahwa pendidikan agama - dalam hal ini pendidikan Islam telah diberikan secara salah, yakni lebih mementingkan ibadah daripada moral. Di samping itu, terdapat persoalan lain, yakni terbatasnya waktu pembelajaran (rata-rata pembelajaran agama hanya berlangsung 2 jam perminggu) serta kurang bervariasinya metode pembelajaran agama Islam. Selebihnya, siswa berhadapan dengan lingkungan yang berbeda dan berlawanan dengan nasihat-nasihat agama yang diperolehnya di sekolah. Menghadapi kondisi seperti itu, sikap siswa berbeda-beda. Bisa jadi, siswa akan agamis namun terkungkung karena seluruh ajaran agama yang diperolehnya berlawanan dengan lingkungannya. Ada siswa yang menjalankan ajaran agama yang diterima di sekolahnya namun bercampur dengan corak kehidupan yang berlawanan dengannya. Misalnya, ia melakukan shalat tapi mau juga berzina

dengan pacarnya. Ada juga siswa yang sama sekali mengabaikan ajaran agama yang diterimanya karena ia kalah dengan lingkungannya. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang ia ikuti hanya sebatas memenuhi kewajiban akademis belaka dan sama sekali tidak untuk memperbaiki corak kehidupannya (Fathoni, 2005: 40-41).

Tulisan ini bermaksud menggali sejumlah kemungkinan untuk mendefinisikan ulang pendidikan agama Islam terutama pada aspek materi ajar dan metodologi pembelajarannya. Ada beberapa topik aktual yang penting untuk segera dimasukkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam, terutama yang berhubungan dengan materi akhlak. Pertimbangan kajian yang difokuskan pada materi akhlak ini disebabkan dua hal. *Pertama*, materi akhlak sepadan dengan isu pendidikan karakter yang sekarang sedang menjadi sorotan publik pengguna jasa pendidikan. *Kedua*, materi akhlak secara teologis merupakan inti ajaran agama Islam, *'alaikum bimakarim al akhlak fainna rabbi bi'atsanî bibâ*, 'hendaklah kalian berakhlak mulia, karena sesungguhnya Tuhanku mengutusku untuk itu (Muthahhari, 1995: 18). *Ketiga*, ada penyempitan makna dan pembelajaran akhlak yang saat ini dibelajarkan dalam pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun di madrasah. Metode pembahasan yang digunakan adalah filsafat pendidikan Islam. data diolah berdasarkan analisis terhadap teks *'conten analysis'* buku-buku materi Pendidikan Agama Islam, terutama PAI di sekolah umum, kemudian didialogkan dengan konteks (peristiwa aktual) dan kebutuhan umat saat ini, lalu disintesis dengan nilai-nilai aktual-universal ajaran Islam.

PEMBAHASAN

Cikal bakal pendidikan agama Islam telah dimulai sejak penjajahan Belanda. Di tingkat perguruan tinggi –saat itu di Fakultas Hukum– diajarkan mata kuliah Islamologi dengan dosen orang-orang non muslim 'orientalis'. Di tingkat sekolah diadakan *tablîgh* oleh perseorangan maupun organisasi Islam dan biasanya dilakukan pada setiap hari Jumat dan Minggu. Pada masa penjajahan Jepang pendidikan agama Islam diselenggarakan lebih resmi, terutama di Sumatera. Maksudnya untuk menarik simpati umat Islam Indonesia kepada Jepang. Meskipun tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang, umat Islam sangat antusias sebab khawatir agama tidak diperhatikan secara publik dan hanya dibebankan kepada keluarga. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Menteri PP&K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan), Ki Hajar Dewantara, mengedarkan surat bahwa pendidikan budi pekerti yang diberikan pada masa penjajahan, dapat diganti dengan pendidikan agama (Islam). Tahun 1956, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia) membolehkan sekolah memberikan pendidikan agama (Islam) dengan syarat, diminta oleh sekurang-kurangnya 10 murid. Tanggal 16 Juli 1951, PP&K dan Menteri Agama mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pendidikan agama (Islam) di sekolah negeri. Tahun 1960 MPRS No II/MPRS/1960 bab II pasal 2 ayat 3 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah dan di

perguruan tinggi, dengan tambahan pernyataan, murid berhak tidak ikut serta ketika wali murid menyatakan keberatan, terutama bagi mereka yang PKI. Tahun 1966 pernyataan tambahan tersebut dihilangkan bersamaan dengan dilarangnya PKI. Sejak itu pendidikan agama (Islam) menjadi mata pelajaran pokok di sekolah dan di perguruan tinggi bahkan ikut menentukan naik/tidaknya seorang murid. Dalam GBHN 1983, pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa didorong supaya menambahkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Pendidikan agama (Islam) semakin kokoh dengan terbitnya UU Sisdiknas nomor 20/2003 (Zuhairini dkk. 1981: 16-20 dan Fathoni, 2005: 35-39).

Ada dua poin penting menyangkut makna historis pendidikan agama Islam. *Pertama*, nama pendidikan agama Islam tidak persis dan tegas sebagai Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi dengan sebutan 'Pendidikan Agama'. Pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa pendidikan agama yang perlu diajarkan kepada warga dan bangsa Indonesia bukan hanya agama Islam karena di Indonesia memiliki banyak agama, seperti Hindu, Budha, Katolik, Protestan dan Islam bahkan ditambah dengan sejumlah aliran kepercayaan. Berarti, sejak awal, pemberian nama dan pembelajaran 'Pendidikan Agama Islam' pun seharusnya sudah mempertimbangkan aspek perbedaan dan pluralitas agama/kepercayaan dan penganutnya. *Kedua*, saat Ki Hajar Dewantara mengedarkan surat bahwa pendidikan budi pekerti yang diberikan pada masa penjajahan, dapat diganti dengan pendidikan agama Islam menunjukkan bahwa substansi pendidikan agama Islam adalah mengajarkan moral/akhlak bukan lebih banyak materi tentang ritus peribadatan saja.

Dewasa ini, materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) senantiasa mengacu kepada silabus yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan hampir disepakati oleh ahli kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Struktur silabus yang sudah tersusun tersebut, secara umum selalu dimulai dengan pembahasan mengenai *thabarab*, *wudlu*, *tayamum*, shalat, jenazah, puasa, haji, umrah dan lain-lain yang bersifat *fiqhiyah* (ketetapan hukum dalam Islam) dan ritual (praktik-praktik peribadatan individual dengan Tuhan) (Supiana dan Karman, 2009: xi-xiv).

Pembelajaran akhlak pun hanya merupakan bidang ajar yang tergabung dengan pembelajaran akidah, sehingga lazim disebut mata pelajaran akidah akhlak. Dalam pembelajaran akidah akhlak, ruang lingkup materi akhlak, kajian biasanya meliputi aspek-aspek: 1) akhlak terpuji yang terdiri atas *khauf*, *taubat*, *tawadhu*, ikhlas, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, *ta'aruf*, *ta'awun*, *tajâhüm*, *tasâmuh*, jujur, adil, amanah, menepati janji dan bermusyawarah; dan 2) aspek akhlak tercela yang terdiri atas kufur, syirik, munafik, *namimah* dan *ghîbah* (Nurul Haq dan Burhanudin, 2010: 39).

Ada dua hal yang perlu dikritisi sehubungan dengan muatan materi akhlak yaitu: 1) muatan materi akhlak umumnya berisi pembelajaran moral yang lebih banyak berdampak pada kesalehan individu terhadap Tuhannya bukan kesalehan

individu yang harus berhadapan dengan kesalehan orang lain atau umat lain. Akibatnya, ada kesan bahwa materi akhlak yang dipelajari oleh siswa yang beragama Islam hanya berhak dipelajari oleh mereka yang beragama Islam saja. Bahkan ada anggapan bahwa ajaran akhlak Islam yang mereka terima jauh lebih baik daripada ajaran moral agama lain; 2) materi akhlak belum menyentuh persoalan-persoalan kontemporer seperti multikulturalisme, gender, feminisme, globalisasi dan humanisme. Setidaknya, materi akhlak perlu dirumuskan ulang dan ditata sedemikian rupa sehingga responsif terhadap isu-isu kontemporer yang tengah dihadapi oleh bangsa ini, misalnya konsep *ta'aruf* dan *tawâdbu* diekspansi menjadi bersikap lemah lembut dan tidak suka menyelesaikan persoalan dengan jalan kekerasan. Konsep kufur dan syirik tidak hanya ditujukan kepada umat nonmuslim tetapi dalam konteks tertentu berlaku pula bagi umat Islam, ketika seorang muslim itu berlaku tidak amanah '*khiyânah*', tidak jujur, tidak adil dan melakukan tindakan korupsi. Rasul Muhammad SAW bersabda, 'tidak beriman orang yang merampas barang berharga sehingga orang lain terbelalak melihatnya' (HR. Bukhari dan Muslim dalam Baqi, 2012: 78).

Metode pembelajaran akhlak, umumnya dikonstruksi sedemikian rupa dari pengertian umum pembelajaran, berdasarkan UUSPN No. 12 Tahun 2003 yaitu sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran (UUSPN No. 12 Tahun 2003). Memperhatikan frasa 'mengonstruksi pengetahuan baru' dan 'penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran' mengasumsikan bahwa semua mata pelajaran berpusat pada penguasaan aspek kognitif. Padahal aspek kognitif merupakan salah satu aspek sasaran pembelajaran di samping aspek afektif dan psikomotor. Untuk mata pelajaran akhlak porsi afektiflah yang lebih banyak, sebab yang dipentingkan dalam pendidikan akhlak bukan pandainya siswa menjawab soal tes melainkan terbiasanya siswa melakukan perbuatan terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak heran jika guru merumuskan pembelajaran akhlak dalam silabus masih berorientasi pada penguasaan kognitif bukan pada aspek afektif-psikomotor 'perilaku praktis' siswa.

Dalam silabus dinyatakan bahwa standar kompetensi 3 untuk pembelajaran akhlak meliputi: a. Memahami akhlak terpuji terhadap lingkungan sosial; dan b. Menghindari akhlak tercela terhadap manusia. Kompetensi dasar pertama untuk standar kompetensi 3.a) adalah, menjelaskan tentang akhlak terpuji terhadap sesama, dengan indikator; i) menjelaskan pengertian akhlak terpuji terhadap sesama manusia dalam masyarakat/lingkungan sosial; ii) menyebutkan macam-macam akhlak terpuji terhadap sesama manusia dalam masyarakat; iii) menjelaskan pengertian *ta'aruf*, *tafâhum*, *ta'âwun*, *tasâmmuh*, jujur, adil, amanah dan menepati janji. Kompetensi dasar kedua untuk standar kompetensi 3.a) adalah menunjukkan dalil naqli tentang akhlak terpuji terhadap

sesama manusia. Indikatornya yaitu melafalkan dalil naqli tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Pengalaman belajar yang diharapkan teralami oleh siswa pada standar kompetensi 3.a. yaitu i) siswa membaca dan mempelajari materi tentang akhlak terpuji terhadap sesama manusia; ii) membiasakan berakhlak terpuji terhadap sesama manusia; iii) membedakan antara akhlak terpuji dengan akhlak tercela (Nurul Haq dan Burhanudin, 2010: 115-117).

Frasa ‘menjelaskan tentang akhlak terpuji’; ‘menjelaskan pengertian akhlak terpuji’; ‘menunjukkan dalil naqli’; ‘melafalkan dalil naqli tentang akhlak terpuji’; ‘membaca dan mempelajari materi tentang akhlak terpuji’; ‘membedakan antara akhlak terpuji dengan akhlak tercela’; menunjukkan bahwa standar kompetensi, kompetensi dasar beserta indikatornya masih berpihak pada penguasaan aspek kognitif siswa. Beruntung pada standar kompetensi 3.a.ii masih muncul pernyataan ‘membiasakan berakhlak terpuji’. Mestinya aspek ‘pembiasaan ini’ mendapatkan porsi lebih besar dibanding dengan indikator lain. Caranya, indikator ‘membiasakan berakhlak terpuji’ tersebut dirinci ke dalam tahapan-tahapan pembiasaan dengan cara dan metode yang tidak direktif ‘menyuruh dan menekan’ tetapi persuasif ‘mengajak bersama-sama dan membujuk’ agar siswa akrab dengan perilaku terpuji.

Secara metodologis, substansi rumusan standar kompetensi keempat yaitu menghindari akhlak tercela terhadap manusia beserta kompetensi dasarnya hampir sama dengan standar kompetensi ke tiga beserta kompetensi dasarnya. Dari sisi materi saja yang berbeda, yang pertama membahas akhlak terpuji dan yang kedua membahas akhlak tercela. Ungkapan metodis yang terdapat dalam kompetensi dasar dan indikatornya sama saja. Kompetensi dasar 1 berbunyi; menjelaskan tentang akhlak tercela terhadap sesama manusia; dengan indikator; a. menjelaskan pengertian *namimah*, *ghodlob* dan *berkelahi*; b. menunjukkan ciri-ciri sifat *namimah*, *ghodlob* dan *berkelahi*; c. menunjukkan dalil naqli akhlak tercela, *namimah*, *ghodlob* dan *berkelahi*. Kompetensi dasar 2 adalah mendemonstrasikan akhlak tercela terhadap sesama manusia, dengan indikator; a. mengklasifikasikan nilai-nilai berakhlak tercela, *namimah*, *godlob* dan *berkelahi*; b. menunjukkan nilai, sikap dan perilaku orang yang menghindari ahlak tercela, *namimah*, *ghodlob* dan *berkelahi*; c. terbiasa menghindari berakhlak tercela, *namimah*, *ghodlob* dan *berkelahi*. Pengalaman pembelajaran yang diharapkan diperoleh siswa adalah (a) siswa membaca dan mempelajari materi akhlak tercela terhadap sesama manusia; (b) siswa mengartikan sifat-sifat tercela; dan (c) siswa menyebutkan sifat-sifat tercela (Nurul Haq dan Burhanudin, 2010: 118-119).

Frasa ‘mendemonstrasikan akhlak tercela terhadap sesama manusia’ pada kompetensi dasar ke 2 patut mendapat perhatian. Jika yang dimaksudkan dari kompetensi dasar tersebut adalah agar anak dapat menghindari akhlak tercela itu harus dengan mengetahui bahkan mendemonstrasikan akhlak tercela, maka rumusan itu menyesatkan. Mestinya rumusan tersebut diubah menjadi ‘mendemonstrasikan cara-cara menghindari akhlak tercela’. Jika redaksinya tetap

demikian, berarti anak diajari oleh gurunya bagaimana berperilaku/berakhlak tercela. Pantaslah, saat ini, banyak siswa berperilaku tercela, seperti tawuran, menjadi anggota geng motor, mabuk-mabukan, narkoba bahkan gemar menyontek saat ujian.

Dalam materi pembelajaran dan pendalaman PAI, pembahasan bidang akhlak didominasi oleh definisi-definisi tentang akhlak, macam-macam akhlak, fungsi akhlak, karakteristik akhlak. Ketika hampir semuanya berisi tentang definisi, maka dapat diduga ulangan pun akan menanyakan definisi-definisi tersebut. Akhirnya, siswa hanya diajari menghafal definisi bukan dilatih membiasakan berakhlak mulia. Pengertian umum tentang akhlak biasanya mengerucut pada pembagian akhlak mahmudah (terpuji) dan akhlak mazmumah (tercela) yang bersifat dikotomis, hitam-putih dan final (Rosyidah, 2009: 127-146). Mestinya pembagian akhlak terpuji dan tercela itu ditopang oleh sejumlah kasus yang mendukung atau menolaknya. Dengan berbasis kasus, anak akan dengan sendirinya memahami bahwa si A melakukan demikian karena ada sebabnya dan si B melakukan hal yang lain pun karena ada sebabnya. Contoh, si A memberi hadiah kepada si B dengan tulus dan ikhlas karena si B telah membantu dalam pelajaran agama Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan terpuji. Sebaliknya, si C memberi hadiah kepada si D dengan harapan pada saat ujian si D membantu menjawab soal untuk si C merupakan perbuatan tercela. Hadiah dapat dikatakan baik ketika seseorang tidak mengharapkan perlakuan khusus dari orang yang diberi hadiah tersebut. Sebaliknya hadiah dapat menjadi tercela jika dimaksudkan agar orang yang diberi hadiah itu memperlakukan dia secara khusus. Kasus pertama tetap disebut hadiah, sedangkan kasus kedua disebut suap.

Ada kesalahan umum dalam praktik pembelajaran akhlak yaitu guru sering tertukar menggunakan istilah akhlak dengan adab. Maksud guru ingin membelajarkan akhlak tetapi sadar atau tidak ia justru lebih banyak membelajarkan adab. Padahal antara adab dengan akhlak itu berbeda makna. Saat guru mengajarkan adab yang dianggap olehnya adalah akhlak di situ terdapat penyempitan makna pembelajaran akhlak menjadi pembelajaran adab bahkan ada kecenderungan lebih mementingkan adab daripada akhlak. Guru agama, sadar atau tidak ternyata lebih banyak mendahulukan mengajar adab membaca (seperti membawa harus di atas kepala jangan ditenteng, carilah tempat-tempat yang dianjurkan dalam membaca al-Qur'an, apa yang harus dilakukan ketika selesai/tamat membaca al-Qur'an) daripada melatih siswa mengamalkan al-Qur'an (Haryono, 2002: 79).

Kata 'akhlak' yang berasal dari bahasa Arab '*akhlaq*' atau '*kehuluq*' (jamak) berarti "tabi'at" atau "budi pekerti" (Aburrasyid dan Hidayat, 2008: 73). Al-Jurjani mengidentifikasi bahwa sifat akhlak itu melekat pada jiwa seseorang dan mendorong berbuat spontan tanpa memerlukan alasan/argumen yang dibuat-buat (Basyir, 1989: 3). Berarti, akhlak itu bersifat laten, disposisional, bertahan lama dan relatif tetap ada pada seseorang. Perbuatan yang kadang-kadang baik

atau buruk bukan akhlak dan tidak spontan, misalnya karena ada pengaruh dari luar atau paksaan juga bukan akhlak. Akhlak adalah kondisi jiwa yang satu sisi bersifat batiniyah-naluriyah dan disisi lain harus terwujud dalam perilaku yang teramati. Rasulullah saw bersabda: “Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal darah, apabila gumpalan darah itu baik, maka menjadi baiklah jasad itu seluruhnya dan apabila gumpalan darah itu rusak, maka menjadi rusaklah jasad itu seluruhnya dan itulah, hati” (Muslim, 1956: 698).

Secara filosofis, kata akhlak sepadan dengan kata etika (*ethos*: Yunani), moral (*mores*: Latin) dan karakter (*character*: Inggris) yang artinya adalah tabi'at, watak atau adat kebiasaan yang menunjukkan kualitas diri seseorang/ sekelompok orang yang berbeda dengan orang/ sekelompok orang lain (*the qualities and features that make a person, group of people and places different from others*) (Bertens, 2001: 4-5 dan Hornby, 2000: 195-196).

Bertens kemudian membedakan antara etika, moral dan akhlak dengan etiket '*etiquette*' yang bermakna sopan santun dan tata krama (Bertens, 2001: 8-11). Dalam bahasa Arab, kata 'etiket' sepadan dengan kata *muhadzab*, *adib* atau *udabā* (Abdurasyid dan Hidayat, 2008: 515). Dalam bahasa Indonesia 'etiket' atau 'sopan santun' seperti disamakan begitu saja dengan kata 'adab'. Padahal dalam Bahasa Arab kata 'adab' itu tidak sama dengan kata 'adab' dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kata 'adab' itu artinya *tamaddun* atau *hadharah* yang sepadan dengan kata 'peradaban' atau 'kebudayaan' (Abdurasyid dan Hidayat, 2008: 193). Dalam Bahasa Indonesia kata 'adab' dapat diartikan sebagai 'kesopanan' (KBBI, 2008: 7).

Bertens mengatakan, istilah 'etika' dengan 'etiket' kerap kali dicampuradukan, padahal perbedaan di antaranya sangat hakiki (Bertens, 2001: 8). Perlakuan ini terjadi juga pada pembelajaran akhlak. Mungkin saja guru agama Islam tidak memahami bahwa antara istilah 'akhlak' dengan 'adab', dalam arti bahasa Indonesia, terdapat perbedaan yang mendasar. Sehingga maksud guru ingin mengajarkan akhlak namun yang terjadi justru mengajarkan adab.

Saat guru menerima tugas pekerjaan rumah dari tangan kiri siswa, sang guru menegur, 'Pakai tangan kanan, nak! Jangan tangan kiri! Itu tidak bagus! Sang guru berpikir bahwa ia telah mengajarkan akhlak kepada siswa, padahal ia hanya telah mengajarkan 'adab', etiket, atau tata krama. Celakanya, banyak guru agama Islam lebih mementingkan 'adab' daripada akhlak. Siswa yang pakaian seragamnya tidak rapi sering dituding sebagai siswa tidak berakhlak bahkan bisa saja hanya karena tidak rapih siswa tersebut dilarang mengikuti ujian, padahal ia tidak pernah menyontek saat ujian berlangsung. Sebaliknya siswa yang berpakaian rapi sering dianggap sebagai siswa berakhlak baik, padahal saat ujian berlangsung ia sering menyontek pekerjaan temannya. Persoalan seorang siswa berpakaian rapi atau tidak, itu termasuk persoalan 'adab' tetapi perbuatan menyontek merupakan persoalan inti dari akhlak. 'adab' dalam arti sopan santun hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan akhlak menyangkut tabi'at perbuatan manusia dari dalam. Bisa saja seseorang yang mementingkan 'adab' itu

berlaku seperti ‘musang berbulu ayam’, dari luar sangat sopan, rapi dan halus tetapi dari dalam penuh dengan kebusukan, menipu dan munafik. Orang yang berakhlak tidak mungkin munafik sebab ketika dia munafik dengan sendirinya dia tidak berakhlak. Allah menjadikan “iman” sebagai asas ad-Din ‘agama’, karena imanlah yang menumbuhkan kesucian dalam jiwa, sebagai unsur pembentuk akhlak yang mulia.

Allah berfirman, *“Katakanlah: Tubanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan suatu yang Allah tiada menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”* (Al A’raf [7]: 3) dalam Digital Al Quran versi 3.2. juz 8).

Adab lebih banyak menyangkut cara perbuatan itu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diharapkan suatu komunitas tertentu. Akhlak menyangkut masalah apakah suatu perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. Jika dilakukan maka disebut mencuri, mau pakai tangan kanan atau tangan kiri, tetap hukumnya mencuri dan karenanya berdosa (Bertens, 2001: 9).

Relasi dengan Pendidikan Karakter

Konsep ‘akhlak’ sepadan dengan konsep ‘karakter’ karena sama-sama memiliki sifat otomatis, bertahan lama, melekat dan ‘mendarah daging’ pada diri seseorang. Karakter ialah perpaduan tiga elemen moral yaitu disiplin moral, kelekatan moral dan otonomi moral. Karakter seseorang dikonstruksi dari ketiga elemen moral tersebut yang dipengaruhi bukan hanya oleh perbedaan individual dalam memahami dan mengetahui makna serta aturan moral tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan faktor sosial budaya yang mempengaruhi individu (Hunter, 2000 dalam Hasanah, 2012: 42).

Agar karakter seseorang itu menjadi bermoral maka karakter perlu diajarkan, dididikan, dibiasakan, dibentuk dan diteladankan. Salah satu upaya membentuk karakter seseorang melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu pendekatan langsung terhadap pendidikan moral termasuk di dalamnya melatih agar siswa melek moral untuk membentengi mereka dari serbuan dari perilaku yang tidak bermoral dan merusak mereka sendiri atau orang lain (Lickona, 1991: 86).

Pendidikan yang terlalu mementingkan prestasi akademik dibanding dengan mengembangkan karakter moral dasar dikhawatirkan dapat memunculkan fenomena-fenomena sosial dan kebudayaan negatif yang mengarah pada dekadensi moral (Huitt dan Vessels, 2002: 98). Di Indonesia gejala ini nampak pada semakin meningkatnya kenakalan remaja bahkan menjurus ke arah perbuatan *immoral* seperti tawuran dan penusukan antarpelajar yang berakibat hilangnya nyawa salah satu di antara mereka. Fenomena geng motor yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat dan pengusaha mini market

24 jam pun menjadi penanda bahwa persoalan moral di kalangan anak remaja semakin mengkhawatirkan.

Hersh mengemukakan bahwa ada lima teori yang dapat digunakan dalam mendidik karakter yang berbasis pada moral, yaitu 1) pendekatan pengembangan rasional, 2) pendekatan pertimbangan, 3) pendekatan klarifikasi nilai, 4) pendekatan pengembangan moral kognitif dan 5) pendekatan perilaku sosial (Hasanah, 2012: 47). Teori Hersh menegaskan bahwa pendidikan karakter yang berbasis pada moral merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai perilaku manusia yang berhubungan baik dengan diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan sosial yang terwujud melalui olah pikir sehingga sikap dan perbuatannya senantiasa dilandasi oleh norma-norma yang secara rasional diterima oleh masyarakat.

Secara filosofis, penekanan Hersh pada aspek rasio menyisakan persoalan. Whitehead menyebutkan bahwa setidaknya rasio memiliki dua fungsi dasar yaitu rasio Ulysses dan rasio Plato. Rasio Ulysses adalah rasio yang digunakan oleh orang-orang pintar namun licik. Rasio ini disebut juga dengan rasio empirisisme atau pragmatisme sempit. Rasio Ulysses mengarahkan usaha manusia untuk menguasai alam agar bisa bertahan hidup dan hidup baik. Rasio Plato adalah rasio yang terus-menerus berusaha memahami makna dan kenyataan hakiki (*the ultimate reality and meaning*). Rasio Plato diarahkan agar manusia mencapai hidup semakin baik di dunia maupun di akhirat kelak (Nugroho, 2001: 58 dan 94). Dalam konteks teori kritis Horkheimer, rasio Plato sepadan dengan rasio objektif sedangkan rasio Ulysses setara dengan rasio instrumental. Hersh harus memilih rasio mana yang melandasi pendidikan karakter? Kenyataannya, jalan hidup manusia selalu mengalami pergeseran dari akal budi 'rasio' objektif ke subjektif-instrumental (Shindunata, 1983: 99-101). Oleh sebab itu peran agama perlu dipertimbangkan oleh Hersh.

Dalam konteks sosiologi agama, penekanan Hersh pada rasio menimbulkan persoalan sebab ia tidak menganggap penting aspek agama. Padahal Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan sistem simbol dan praktik-praktik ritual tentang hal-hal yang kudus dan terciptakan dalam suatu komunitas moral (Turner, 1991: xii). Artinya, pemahaman dan perilaku keberagamaan seseorang berhubungan dengan pengetahuan dan perilaku moral seseorang. Dulu ada anggapan bahwa semakin seseorang itu taat melaksanakan ibadahnya maka ia semakin bermoral. Kini, anggapan itu tidak sepenuhnya benar sebab faktanya banyak orang yang taat beribadah, shaleh, justru melakukan tindak kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang lain terutama yang berbeda agama atau alirannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesalahan penerimaan informasi tentang ajaran agamanya (Ismatullah, dalam Pikiran Rakyat, 20-8-2012). Rupanya teori Hersh ingin menghindari dari kenyataan ini, namun demikian teori Durkheim pun tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Hal yang perlu diperbaharui dari teori moral yang berhubungan dengan agama adalah

perlunya meredefinisi pemahaman seseorang tentang agamanya sebelum ia merumuskan langkah-langkah praktis tentang cara-cara pendidikan agama membelajarkan karakter yang berbasis moral kepada anak didik.

Ketika pendidikan agama Islam dituntut untuk berperan aktif dalam membentuk dan mendidihkan karakter moral khususnya kepada siswa dan umumnya kepada masyarakat Indonesia maka terlebih dahulu harus dilakukan redefinisi pemahaman umat Islam atas agama Islam dan pendidikan Islam. Hal substansial yang harus diperbaharui dalam pendidikan Islam adalah menciptakan pendidikan di kalangan umat Islam yang dapat mendorong produktivitas intelektual yang kreatif dalam semua bidang keilmuan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai inti Islam (Rahman, 1982: 134).

Umumnya, sikap keberagamaan umat Islam itu defensif dan apologetik yakni cenderung menganggap bahwa dirinya yang paling benar serta selalu memojokkan agama lain (Rahman, 1982: 86 dan Fauzi dalam Kompas, 22-2-2011). Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan pikiran umat Islam dari pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh dampak dari gagasan-gagasan Barat yang datang melalui berbagai disiplin ilmu, terutama gagasan yang akan mengguncangkan standar moral umat Islam. Agama Islam menjadi ideologis dan pendidikan Islam pun menjadi dikotomis.

Persoalan pertama menunjukkan ketidakmampuan umat Islam mengambil jarak antara agama 'yang mutlak' dengan pengetahuan agama yang senantiasa berkembang. Umat Islam dalam pengertian ini akan menyamakan begitu saja antara agama dengan ilmu agama. Sehingga ketika mereka bertemu dengan orang yang berbeda pemahaman mengenai persoalan agama dianggapnya mereka telah berbeda agama. Sifat indoktrinasi agama pun menyebabkan mereka menyimpulkan bahwa ketika mereka berbeda, salah satunya harus ada yang disalahkan dan dibenarkan. Mereka menganggap bahwa dirinya selalu harus benar dan orang (umat) lain itu salah, sebab ajaran inilah yang mereka terima/peroleh dari guru-guru mereka. Dalam tradisi orientalis mereka ini dimasukkan sebagai Islam fundamentalis atau radikal (Esposito dkk, 2012: 15).

Persoalan kedua menunjukkan bahwa pendidikan Islam kurang memperhatikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Persoalan ini menimbulkan dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam. Mereka berpendirian bahwa hanya pengetahuan yang berhubungan dengan akhiratlah (tauhid, aqidah, fiqh dan ilmu kalam) yang benar-benar diakui sebagai ilmu. Di luar itu (biologi, kimia, fisika, sosiologi dan antropologi) tidak benar-benar diakui sebagai ilmu. Karena ilmu semacam ini terlalu mengutamakan aspek-aspek duniawi. Ilmu duniawi hanya memberikan keterampilan untuk mengolah dunia saja maka hukum mempelajarinya pun hanya wajib kifayah (Irawan, 2007: 2).

Cara untuk mengatasi kedua persoalan ini adalah perlunya pendidikan Islam mendefinisikan ulang konsep-konsep lama tentang Islam, ilmu dan akhlak dengan konsep-konsep baru sambil menjaga keseimbangan orientasinya dengan yang universal. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan

karakter bangsa yang dirasa asing (kebarat-baratan) sedemikian rupa diorientasikan dengan nilai-nilai Islam agar mampu dipahami secara universal dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Nilai-nilai seperti demokratis, toleransi, cinta damai, semangat kebangsaan dan cinta tanah air dirumuskan kembali ke dalam suatu konsep yang dapat diterima oleh banyak pihak terutama oleh pihak yang masih berpandangan tekstual.

Demokratis adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara (KBBI, 2008: 310). Talbi menyamakan konsep demokrasi dengan istilah *shura*' atau musyawarah '*syura*' yang semakna dengan konsep konsultasi '*consultation*'. Hal ini didasarkan pada sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW sering berkonsultasi dengan para sahabat, seperti pada kasus perang Uhud. Menurut Talbi, dengan jelas menyuruh umat manusia terutama pemimpin untuk senantiasa bermusyawarah ketika hendak memutuskan perkara yang berurusan dengan kepentingan umat (Cooper et.al., 2000: 141). QS. Asy-syura, [42]: 38 menyatakan: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*" (Digital Al Quran versi 3.2. juz 25).

Bagi Talbi, musyawarah adalah salah satu nilai yang esensial dari moral berbangsa dan bernegara, karena ia berhubungan dengan penggunaan kekuasaan yang dengan kuasa itu membuat musyawarah menjadi sangat mungkin untuk menggiring opini publik dalam rangka melayani masyarakat. berarti menolak konsep dan aturan tirani (Cooper et.al., 2000: 140-141).

Toleran '*tolerance*' adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan (aliran) agama, suku, etnis, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan tindakan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian dirinya (KBBI, 2008: 1477). Istilah ini sepadan dengan konsep *ikhtilaf* (*diversity of religious opinion*) jika perbedaan tersebut terjadi antar mazhab atau aliran dalam agama Islam. Konsep yang relevan dengan toleransi antar umat beragama adalah konsep *ta'addudiyya 'pluralism'* yang menjadi fondasi untuk menanamkan rasa saling menghargai (*mutual respect* atau *al-ibtiram al-mutabadil*) (Nettler mengutip Talbi dalam Cooper et.al., 2000: 135-136).

Cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyukai, menyenangkan dan berharap suasana aman, tidak ada kerusuhan, tenteram dan tidak bermusuhan (KBBI, 2008: 268 dan 290). Dalam Islam sama dengan konsep *islah*. QS. An-Nisâ' [4]: 114 menyatakan, *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian di antara manusia....*(Digital Al Quran versi 3.2. juz 5). Hal yang berhubungan dengan cinta damai adalah menghindari kekerasan. Kekerasan merupakan serangan atau invasi secara fisik maupun psikologis yang dilakukan seseorang/sekelompok orang terhadap seseorang/sekelompok orang. Dalam Islam tidak ada paksaan ataupun kekerasan meskipun berhubungan dengan akidah atau agama. QS. Al-Baqarah [2]: 256

menyatakan: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).....(Digital Al Quran versi 3.2. juz 3).*

Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Kedua konsep ini sepadan dengan istilah *wataniyyah ‘patriotism’* dan *qawmiyya ‘nationalism’*. QS. Al-Baqarah [2]: 60 menyatakan: *“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya..... dan QS. Al-Baqarah [2]: 126; menyebutkan.... “Jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian”* (Digital Al Quran versi 3.2. juz 1). Hal ini menandakan bahwa mencintai bangsa atau kaum itu dianjurkan.

Orientasi pendidikan Islam yang melingkupi nilai karakter kebangsaan di atas hendaknya tercermin dalam kurikulum yang secara organis mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis karakter moral atau akhlak (kebangsaan) harus memenuhi beberapa prinsip yaitu, 1) integrasi; Pendidikan agama Islam yang berbasis karakter moral dan akhlak kebangsaan harus terintegrasi pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan secara komprehensif dan terencana dengan baik. Pembelajaran pun hendaknya integral dengan kegiatan lain seperti ekstra kurikuler. Lubis menyebutnya dengan pendekatan *interdisipliner integratif* (Lubis, 1984: 43); 2) relativitas; Pendidikan agama Islam yang berbasis karakter moral dan akhlak kebangsaan hendaknya merupakan suatu sistem yang sifatnya berkembang terus-menerus sebagai suatu proses yang tak pernah berakhir. Proses pembelajaran pun dilaksanakan melalui proses belajar aktif dan kreatif. Peserta didik merupakan subyek yang berupaya menjadikan nilai moral berbangsa sebagai miliknya dan menjadikan nilai-nilai yang sudah dipelajarinya itu sebagai dasar mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih dinamis dan menyegarkan; 3) lingkungan. Prinsip ini mengandaikan bahwa sekolah/madrasah dijadikan sebagai lingkungan yang hidup dan terbuka dengan berbagai persoalan masyarakat sehingga pada gilirannya mampu mengubah struktur masyarakat yang ada menjadi lebih baik (Hasanah, 2012: 147). Saat umat Islam Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada banyak agama dan aliran-aliran dalam agama Islam maka materi PAI mestinya juga membahas perangkat-perangkat yang memungkinkan peserta didik mampu memaknai perbedaan tersebut. Misalnya dengan memberikan dasar-dasar ilmu perbandingan agama atau membahas perkembangan pikiran manusia terhadap agama (Fauzi dalam Kompas, 22-2-2011 dan Lubis, 1984: Bab I dan II).

Prinsip berikutnya yang perlu ditambahkan dari tiga prinsip di atas adalah 4) timbal balik. Antara agama dengan karakter/moral/akhlak saling berhubungan dan menghadirkan satu sama lain. Corak keberagamaan seseorang akan

mempengaruhi ragam akhlak yang dia perbuat. Sebaliknya, ragam akhlak terutama dalam konteks keilmuan dapat mempengaruhi cara beragama seseorang. Jika pemahaman umat Islam terhadap agamanya masih bersifat eksklusif bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari pun ia masih bersikap eksklusif, terutama saat berhubungan dengan orang lain yang di Indonesia, agamanya beragam, meskipun mayoritas beragama Islam. Sebaliknya, jika inklusif bisa jadi dalam berhubungan dengan orang lain, terutama yang berbeda agama ia pun akan inklusif; 5) prinsip relevansi/adaptasi. Prinsip relevansi menuntut bahwa kurikulum pendidikan agama Islam senantiasa harus fungsional dan mampu menjawab segenap tantangan zaman baik di masa sekarang maupun di masa depan yang semakin cepat berubah dan kompleks.

Kelima prinsip di atas pada dasarnya menghindari praktik pendidikan agama Islam yang simbolis, formalis, apologetis dan fanatis (Fatimah, dalam Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam, 2012: 122-126). Kegagalan praktik pendidikan agama Islam yang memusatkan pada penanaman dan pembentukan *al-akhlâk al-kharîmah*, sebagian besar disebabkan karena praktik pendidikan agama Islam yang belum menyentuh pada persoalan inti keberagamaan itu sendiri, yaitu mengubah masyarakat, bangsa, negara dan peradaban umat manusia ke arah yang lebih baik.

SIMPULAN

Ada anggapan bahwa pendidikan agama Islam (PAI) telah diberikan secara salah, yakni lebih mementingkan ritualitas daripada akhlak, di samping terbatasnya waktu dan kurang bervariasi pembelajaran. Materi akhlak yang ada di samping belum menyentuh isu-isu kontemporer seperti multikulturalisme, gender, feminisme, globalisasi dan humanisme. Setidaknya, materi juga masih terlalu berpihak pada penguasaan aspek kognitif siswa. Sikap keberagamaan umat Islam yang defensif, formalisme, simbolisme dan apologetik juga menyulitkan tingkat keefektifan pendidikan akhlak. Dalam konteks keilmuan, PAI kurang memperhatikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum sehingga masih ada dikotomi keilmuan dalam pendidikan Islam. Mereka berpendirian bahwa hanya pengetahuan yang berhubungan dengan akhiratlah (tauhid, aqidah, fiqh dan ilmu kalam) yang benar-benar diakui sebagai ilmu. Di luar itu (biologi, kimia, fisika, sosiologi dan antropologi) tidak benar-benar diakui sebagai ilmu. Karena ilmu semacam ini terlalu mengutamakan aspek-aspek duniawi. Ilmu duniawi hanya memberikan keterampilan untuk mengolah dunia saja maka hukum mempelajarinya pun hanya wajib kifayah. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut perlu pendefinisian ulang atas sejumlah konsep lama tentang Islam, ilmu, akhlak dan PAI itu sendiri dengan konsep-konsep baru sambil menjaga keseimbangan orientasinya dengan yang universal. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan asing (kebarat-baratan) sedemikian rupa diorientasikan dengan nilai-nilai Islam agar mampu dipahami secara universal dan dapat

dipertanggungjawabkan secara rasional. Nilai-nilai seperti demokratis, toleransi, cinta damai, semangat kebangsaan dan cinta tanah air hendaknya dirumuskan kembali ke dalam suatu konsep yang dapat diterima oleh banyak pihak terutama oleh pihak yang masih berpandangan tekstual. Secara esensial konsep etika, moral, karakter dan akhlak itu semakna. Oleh karena itu, PAI dapat mengorientasikan diri pada pembelajaran agama Islam yang berbasis akhlak, moral dan karakter. Agar berlangsung efektif, pembelajaran tersebut hendaknya mempertimbangkan prinsip; 1) integrasi, 2) relativitas, 3) lingkungan, 4) timbal balik dan 5) relevansi atau adaptasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburrasyid dan Hidayat. 2008. *Kamus Bahasa Arab*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baqi, Abdul, Fuad, Muhammad. 2011. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Basir, Azhar. 1989. *Faham Akhlak dalam Islam*, Yogyakarta: SM.
- Bertens, K. 2001. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Cooper, John, Nettler, Ronald and Mahmoud, Mohamed. 2000. *Islam and Modernity Muslim Intellectuals Respond*. New York: I.B. Tauris Publishers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Digital Al Quran versi 3.2.
- Esposito, John L. 2012. *Moderat atau Radikal*. Jakarta: Referensi.
- Fathoni. 2012. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Fatimah, Siti. 2012. Formalisme Pendidikan Karakter di Indonesia: Telaah Pendidikan Islam, dalam *Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam*, volume XXVII nomor 1, 2012/1433.
- Fauzi, Ahmad. 2011. Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam *Kompas*, edisi Selasa, 22-2.
- Hasanah, Aan. 2012. *Pendidikan Karakter Berperspektif Islam*. Bandung: Insan Komunika.
- Haryono, Yudhi M. 2002. *Al Quran Kritis Studi Tematik dan Metoda Baru*. Jakarta: Inti Media.
- Hornby, A.S. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Huitt W., and Vessels, G. 2002. Character Education. Dalam Guthrie J (ed), *The Encyclopedia of Education* (2nd ed.), New York: Macmillan.
- Imam Bukhari. 1956. *Shahib Bukhari*, Kairo: Darul Kuttab.
- Imam Muslim. 1956. *Shahib Muslim*, Kairo: Darul Kuttab.
- Irawan. 2007. *Tokoh-Tokoh Filsafat Sains Dari Masa ke Masa*. Bandung: Intelekia Pratama.
- Ismatullah, Deddy. 2012. Akar Konflik Sunni-Syiah dalam *Pikiran Rakyat*, 30-8.

- Kemdiknas. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kemdiknas. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter bangsa tahun 2010-2025*. Pemerintah Indonesia.
- Kemdiknas. 2011. *Kumpulan Materi TOT Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa*, Jakarta.
- Kemdiknas. 2011. *Pedoman Pendidikan karakter dan Budaya Bangsa*, Direktorat Pembinaan Kurikulum, Depdiknas.
- Kompas, Edisi, 22-2-2011.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Characte*. New York: Bantam.
- Lubis, Ibrahim. 1984. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Falsafah Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, Alois. A. 2001. *Fungsi Rasio Alfred North Whitehead*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nurul Haq dan Burhanudin, Undang. 2010. *Akidah Akhlak*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf.
- Pikiran Rakyat, Edisi, 30-8-2012.
- PPM. 1987. *Risalah Islam tentang Akhlak*, Yogyakarta: SM.
- Rahman, Fazlul. 1982. *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rosyidah, Ida. 2009. *Pendalaman Materi PAI*. Bandung: ICE Consultan.
- Shindunata.1983. *Dilema Usaba Manusi Rasional*. Jakarta: Gramedia.
- Supiana dan Karman. M. 2009. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Suprayogo, 2012 kutipan dalam, *Tajuk Rencana Pikiran Rakyat*, Edisi 30-8-2012
- Turner, Bryan.S. 1991. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publications.
- Van, Peursen, C.A. . 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zuhairini, dkk. 1981. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional.